

ABSTRAK

Adanya ketentuan jaminan fidusia memberikan kemudahan bagi pencari kredit dengan tanpa harus menyerahkan barang yang dijaminkan secara fisik seperti dalam gadai. Fidusia di dalam pelaksanaannya kemudian tidak dipergunakan oleh para pengusaha saja, tetapi dipergunakan juga oleh masyarakat pada umumnya. Obyek fidusia semula hanya benda bergerak tetapi dalam perkembangannya juga dapat diterapkan terhadap benda tetap. Setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia lebih mempertegas apabila ada wanprestasi seperti contoh penggelapan maka sudah menjadi wilayah hukum pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: (1) aspek pidana pada pengalihan yang terjadi pada jaminan fidusia sebagai dasar putusan pada proses peradilan, (2) kendala dalam optimalisasi hukum pidana dalam implementasinya pada proses peradilan pidana terhadap kasus pengalihan jaminan fidusia, (3) pertimbangan hakim dalam memutus perkara pengalihan jaminan fidusia pada Putusan Nomor 73/Pid.sus/2012/PN.Blora jo no.02/Pid/2013/PT/Smg jo no.1310K/Pid.sus/2014.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder dengan studi pustaka dan studi dokumen. Analisis data secara kualitatif dan permasalahan dianalisis dengan teori jaminan, teori kepastian hukum, dan teori pemidanaan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Aspek pidana yang ada dalam pengalihan objek jaminan fidusia terdapat pada ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Pasal-pasal pada KUHP yang bisa menjerat pelaku bilamana memenuhi unsur pidana pada KUHP, (2) Kendala dalam optimalisasi ketentuan pidana undang-undang jaminan fidusia berasal dari faktor internal penegak hukum dan fasktor eksternal menyangkut pengalihan objek jaminan fidusia dan kelemahan substansi ketentuan pidana Undang-Undang jaminan fidusia, (3) Putusan PN Blora No.73/Pid.Sus/2012/PN.Bla memutuskan kepada Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang mengalihkan objek jaminan fidusia yang telah memenuhi unsur pada ketentuan pidana Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Kata Kunci: Aspek Pidana, Pengalihan Jaminan Fidusia, Peradilan Pidana

ABSTRACT

The provision of fiduciary guarantees makes it easy for credit seekers without having to hand over items that are physically pledged as in a mortgage. Fiduciary in its implementation then not only used by entrepreneurs, but also used by society in general. Fiduciary objects were originally only movable objects but in their development can also be applied to fixed objects. After the issuance of Law Number 42 Year 1999 concerning Fiduciary emphasized that if there were defaults such as embezzlement, it had become a criminal law territory.

This study aims to determine and analyze: (1) criminal aspects in the transfer that occurs in fiduciary guarantees as the basis for decisions in the judicial process, (2) obstacles in optimizing criminal law in its implementation in criminal justice processes in the case of transfer of fiduciary guarantees, (3) Judge's consideration in deciding the case of transfer of fiduciary guarantees in Decision Number 73/Pid.sus/2012/PN.Blora jo no.02 /Pid/2013/PT/ Smg jo no.1310K/Pid.sus/2014.

The method used in this research is normative juridical. The specifications of this study are analytical descriptive. The data source used is secondary data. Secondary data with literature and document studies. Data analysis is qualitative and problems are analyzed with guarantee theory, legal certainty theory, and criminal theory.

Based on the results of the study it can be concluded: (1) The criminal aspects that exist in the transfer of fiduciary security objects are contained in the criminal provisions of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees and Articles of the Criminal Code which can ensnare perpetrators if they meet the criminal element in the Criminal Code, (2) Constraints in optimizing criminal provisions of the fiduciary guarantee law stem from internal factors of law enforcement and external factors concerning the transfer of fiduciary security objects and weaknesses of the substance of the criminal provisions of the fiduciary guarantee law, (3) Blora District Court Decree No.73/Pid.Sus/2012/PN.Bla decided to the Defendant as a criminal offense who transferred the object of fiduciary security that had fulfilled the elements of the criminal provisions of the Fiduciary Security Act.

Keywords: Criminal Aspects, Transfer of Fiduciary Guarantees, Criminal Justice